

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 TERHADAP
PRAKTEK JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DI PEGADAIAN
KONVENSIONAL CABANG KARTASURA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

**Seruni Harumsari
I 000 150 018**

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 TERHADAP
PRAKTEK JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DI PEGADAIAN
KONVENSIONAL CABANG KARTASURA**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

Seruni Harumsari

I 000 150 018

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Harun', with a large circular flourish at the top and a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. Harun, MH.

NIK 343

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 TERHADAP
PRAKTEK JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DI PEGADAIAN
KONVENSIONAL CABANG KARTASURA**

**OLEH
SERUNI HARUMSARI
I000150018**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 14 Februari 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Drs. Harun, MH.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

IPDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 April 2019

Penulis



SERUNI HARUMSARI

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 TERHADAP
PRAKTEK JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DI PEGADAIAN
KONVENSIONAL CABANG KARTASURA**

Abstrak

Tujuan penelitian ini tujuan untuk mengetahui praktek jual beli emas secara tidak tunai di PT. Pegadaian (Persero) Kartasura ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian yang ada di lapangan. Adapun, sumber data yang dikumpulkan oleh penulis bersumber dari data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis melalui metode wawancara kepada karyawan PT. Pegadaian (Persero) Kartasura dan data sekunder yang melengkapi penelitian ini berupa beberapa dokumen-dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan ini. Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis data kualitatif. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara singkat, praktek yang terjadi di PT Pegadaian (Persero) Kartasura sejauh ini telah sesuai dengan apa yang ada dalam Fatwa DSN-MUI nomor 77/DSN-MUI/V/2010.

Kata kunci: Jual Beli Emas Tidak Tunai, Angsuran, Pegadaian, dan DSN-MUI

Abstract

The purpose of this study is to find out the practice of buying and selling gold in non-cash at PT. Pegadaian (Persero) Kartasura in terms of the Fatwa DSN-MUI Number 77/DSN-MUI/V/2010. The research conducted is a field research using a descriptive approach that is directly related to the subject of research in the field. Meanwhile, the source of data collected by the author comes from primary data is data collected by the author through the interview method to employees of PT. Pegadaian (Persero) Kartasura and secondary data that complement this research in the form of several documents and books related to this problem. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique. The results obtained in this study can be briefly explained, the practice that occurred at PT Pegadaian (Persero) Kartasura so far has been in accordance with what is in the Fatwa DSN-MUI number 77/DSN-MUI/V/2010.

Keywords: Buying and Selling Gold Non-Cash, Installment Payment, Pegadaian, and DSN-MUI

1. PENDAHULUAN

Jaman yang modern ini, banyak dikenal berbagai jenis transaksi yang salah satunya jual beli. Jaman sudah modern, ekonomi Islam pun sudah mengalami perkembangan. Salah satunya dalam praktek kegiatan yang dinamakan jual beli

atau bermuamalah. Bermuamalah dalam Islam juga memiliki ragam seperti jual beli emas secara tidak tunai yang beberapa tahun terakhir ini menjadi kegemaran masyarakat di Indonesia.

Jual beli merupakan salah satu cara perpindahan kepemilikan yang dihalalkan oleh Al-Qur'an. Ia telah ada sebelum Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an mengatur tijarah (bisnis) yang didalamnya termasuk jual beli, agar pelaksanaannya dilakukan atas dasar saling rela.¹ Fitrah manusia adalah hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu aktivitas muamalah yang sering bahkan selalu dilakukan oleh setiap orang adalah akad jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar dalam berbisnis. Mengapa demikian, karena substansi dunia bisnis atau perdagangan tidak lain adalah jual beli yang kemudian dikembangkan dengan model-model bisnis yang sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi.²

Transaksi jual beli tentu saja dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan yang salah satunya adalah Pegadaian. Salah satu transaksi yang ditawarkan oleh pegadaian merupakan jual beli emas secara tidak tunai tersebut, baik itu emas batangan ataupun emas murni yang belum menjadi perhiasan dan emas yang sudah menjadi perhiasan. Jual beli secara tidak tunai adalah suatu transaksi pembelian yang dilakukan pada suatu barang, dengan cara pembayaran yang dilakukan secara bertahap atau angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.³ Pegadaian menawarkan untuk dapat memiliki emas dengan cara jual beli secara tidak tunai dan hal ini sangat mengundang masyarakat untuk memilikinya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang sistem dan praktek jual beli emas secara tidak tunai yang dijalankan oleh pegadaian konvensional sebelum dan sesudah dikeluarkannya Fatwa DSN-

¹ Nur Fathoni, "*Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI*", *Economica* Vol IV edisi 1, 2013, 51

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), 2017, hlm.65

³ Indra Suwanda, *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI no.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Studi PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm.5

MUI no.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai serta proses dalam penerapannya sudah memenuhi syariat Islam dan juga sesuai dengan yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil dan mengumpulkan berdasarkan atas data yang diperlukan dan diperoleh dari lapangan atau responden dengan lokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan topik dan masalah yang akan diteliti berdasarkan fenomena-fenomena yang sedang berkembang.⁴ Pendekatan deskriptif dipilih untuk menjadi metode pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena pendekatan ini akan langsung memberikan gambaran tentang proses atau praktek jual beli emas yang terjadi di PT Pegadaian (Persero) Kartasura.

Data Primer, merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri baik perorangan atau organisasi.⁵ Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶ Data yang dimaksudkan ini merupakan data hasil wawancara dengan pihak manager dari Pegadaian Karatasura yang memahami langsung tentang tata cara jual beli emas secara tidak tunai pada PT Pegadaian (Persero) Kartasura. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi atau file digital.⁷ Data ini bersumber dari buku tentang jual beli, *Murābahah*, muamalah, jual beli tidak tunai serta dari buku lain dan berkas-berkas yang dimiliki oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Kartasura.

⁴ Zuhriah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia PT. Pegadaian Persero (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017), hlm.25

⁵ Firdaus Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish), 2018, hlm.102

⁶ V. Wiratna Sujarwati, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRES), 2014, hlm.73

⁷ Firdaus Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, hlm. 102

Metode pengumpulan datanya sendiri, menggunakan metode wawancara yang dilakukan bersama dengan pihak PT Pegadaian (Persero) Kartasura yaitu dengan Ibu Desy. Penulis juga menggunakan analisis data kualitatif yang berupa penguraian dari data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis selama masa penelitian.

3. HASIL PEMBAHASAN

Jual beli secara tidak tunai atau dalam kata lain kredit merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh seseorang untuk membeli suatu barang dengan sistem angsuran atau cicilan yang dapat dibayarkan tiap bulannya dengan biaya angsuran tertentu, tergantung dengan barang apa yang akan dibeli secara kredit atau angsuran. Contoh barang yang akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat adalah emas. PT Pegadaian (Persero) Kartasura memiliki produk jual beli emas secara tidak tunai yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang ingin memiliki emas namun dengan cara yang lebih mudah, yaitu secara angsuran.

Adanya transaksi jual beli secara tidak tunai ini menimbulkan berbagai pertanyaan pada masyarakat tentang kehalalan transaksi tersebut dalam Islam. Dalam agama Islam ada hukumnya bahwa jual beli emas itu harus secara langsung dan tunai sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. Karena hal itulah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

DSN-MUI mengeluarkan fatwa tersebut karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yakni:

1. Banyaknya minat masyarakat dalam bertransaksi jual beli emas secara angsuran yang dapat dibayar secara berkala.
2. Adanya perbedaan pendapat antara yang membolehkan dan tidak membolehkan transaksi jual beli emas dengan sistem kredit atau angsuran.

3. DSN-MUI ingin membuat sebuah acuan agar nantinya tidak ada lagi yang memperlmasalahkan tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai.

Melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai tetap ada batasannya serta ketentuan-ketentuan agar tidak terjadi kesalahan dalam bertransaksi, batas dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilarangnya penambahan harga jual (*Šaman*) selama jangka waktu perjanjian jual beli meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas dalam transaksi jual beli secara tidak tunai dapat dijadikan jaminan kembali.
- c. Emas yang telah dijaminkan tidak boleh dijualbelikan oleh pihak manapun sehingga menimbulkan perpindahan kepemilikan.

Pegadaian (Persero) dalam hal ini merupakan lembaga ekonomi yang dapat melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai harus mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang mengatur tentang jual beli emas secara tidak tunai yang beracuan pada Al-Quran dan hadits serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satunya merupakan praktek pelaksanaan dari jual beli emas secara tidak tunai yang menjadi salah satu produk di Pegadaian (Persero).

Transaksi jual beli emas secara tidak tunai di PT Pegadaian (Persero) Kartasura menggunakan akad jual beli dan angsuran. Harga awal emas serta angsuran setiap bulannya yang harus dibayarkan oleh nasabah ditentukan oleh pihak pegadaian. Jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya berjumlah sama atau tidak mengalami penambahan maupun pengurangan jumlah angsuran. Naik turunnya nilai emas juga tidak mempengaruhi jumlah angsuran setiap

bulannya. Pembayaran angsuran berdasarkan pada kesepakatan awal yang disepakati oleh pihak nasabah dan pihak pegadaian.

Pembayaran angsuran yang bersifat sama atau tetap setiap bulannya ini, menurut penulis telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada pernyataan yang menunjukkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan apabila harga jualnya (*Šaman*) tidak bertambah sama sekali selama masa perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah habis masa perjangiannya.

Namun, bila terjadi keterlambatan dalam pembayaran yang dilakukan oleh nasabah maka pihak PT Pegadaian (Persero) Kartasura berhak untuk mengajukan denda sebesar 4% per hari dari biaya angsuran setiap bulannya. Contoh kasusnya, Bobi adalah seorang nasabah dari PT Pegadaian (Persero) Kartasura yang melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai yang setiap bulannya harus membayar sebesar Rp 1.500.000. Namun, Bobi telat membayar angsuran selama 4 (empat) bulan yaitu bulan februari, maret, april dan mei. Denda yang dimiliki Bobi selama telat membayar angsuran selama 4 bulan tersebut sebesar Rp 2.400.000. Jadi, total Bobi harus membayar dibulan keempat sebesar Rp 4.240.000. Pihak PT Pegadaian (Persero) Kartasura memberlakukan sistem denda ini bertujuan agar nasabah membayar angsuran secara rutin dan tepat waktu.

Diberlakukannya denda ini merupakan suatu hal yang wajar karena penetapan denda ini merupakan salah satu cara untuk mendisiplinkan nasabah yang menggunakan sistem angsuran agar membayar angsuran tepat waktu. Pengenaan denda ini sudah diinformasikan di awal oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Kartasura kepada nasabah apabila nasabah telat membayar angsuran.

Akad atau sistem yang digunakan oleh PT Pegadain (Persero) Kartasura merupakan jual beli, namun karena nasabah melakukan jual

beli secara tidak tunai atau kredit atau dalam kata lain angsuran, maka setelah melakukan akad jual beli yang maksudnya adalah penyerahan uang muka untuk membayar emas kepada pihak pegadaian lalu setelahnya transaksi yang awalnya adalah jual beli berubah menjadi sistem angsuran. Pihak pegadaian akan membelikan terlebih dahulu emas milik nasabah. Selama masa angsuran, emas akan disimpan atau dijadikan jaminan oleh pihak pegadaian sampai nasabah melunasi seluruh angsuran. Jika, angsuran sudah lunas maka emas tersebut akan diserahkan kepada nasabah. Jadi, dalam hal ini terdapat dua akad terpisah yaitu akad jual beli dan akad angsuran. Akad jual beli dalam pegadaian sama dengan akad *Murābahah* yang memang dibolehkan dalam Islam. Menurut istilah *Murābahah* adalah jual beli suatu barang, di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dan harga jual tersebut disetujui pembeli.⁸ Konsep tentang *Murābahah*, sama dengan konsep jual beli yang diterapkan oleh pegadaian. Jadi, menurut penulis, transaksi jual beli ini boleh dilakukan karena memang sesuai dengan syariat Islam.

Namun, dalam praktiknya terdapat akad tersembunyi yaitu, akad gadai. Gadai adalah kegiatan meminjam barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara penggadai dengan lembaga gadai (penerima gadai)⁹. Menurut penulis, dua akad ini tidak terjadi dalam satu transaksi, karena dalam prakteknya hanya terdapat akad jual beli emas secara tidak tunai. Emas sebagai objek jual beli memang ditahan atau disimpan oleh pihak pegadaian namun bukan berarti didalamnya termasuk akad gadai, karena dari pengertian gadai sebelumnya gadai dilakukan untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus,

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 87

⁹ *Ibid.*, hlm. 131

dalam hal ini nasabah yang melakukan transaksi tidak memperoleh sejumlah uang namun hanya membayar sejumlah angsuran dengan nilai yang sama setiap bulannya. Akad gadai baru dapat dilakukan apabila nasabah telah selesai dalam melakukan angsuran. Bila emas sudah lunas baru pihak nasabah dapat melakukan akad gadai dengan pegadaian. Namun, hal ini jarang terjadi karena nasabah biasanya langsung mengambil emas yang telah lunas masa angsuran.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa barang atau emas yang telah dibeli boleh untuk dijadikan jaminan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Tetapi, dalam transaksi jual beli emas secara tidak tunai di PT Pegadaian (Persero) Kartasura ini tidak ada yang dinamakan jaminan fidusia kepada nasabah karena emas sebagai objek transaksi ini tidak langsung diberikan kepada nasabah melainkan akan ditahan terlebih dahulu oleh pihak pegadaian sampai nasabah bisa melunasi angsuran emas tersebut. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan bahwa emas boleh dijadikan bahan jaminan yang terdapat di fatwa DSN-MUI.

Emas yang telah dibeli dan dijadikan jaminan oleh nasabah tidak dapat dipindahtangankan sampai angsuran emas tersebut lunas. Namun, jika memang nasabah ingin memindahtangankan emas tersebut maka nasabah dapat mengajukan ketidakmampuan untuk melunasi kepada pihak pegadaian, maka pihak pegadaian akan melakukan lelang pada emas tersebut untuk menutup angsuran lalu nasabah mendapat sisa uangnya kembali dari pihak pegadaian. Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan pernyataan dalam fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas yang menjadi objek jual beli tidak dapat diperjualbelikan yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan emas tersebut.

Praktek yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Kartasura telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010

tentang jual beli emas secara tidak tunai. Mulai dari pelaksanaan akad jual beli, mekanisme denda apabila terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran, angsuran juga disesuaikan dengan kemampuan nasabah, serta tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian masalah saat nasabah tidak sanggup untuk membayar angsuran. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Kartasura, menurut penulis, sudah sesuai dengan yang tertulis di dalam DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian analisis di atas yang menjadi pokok masalah dari skripsi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: jual beli emas secara tidak tunai atau angsuran di PT Pegadaian (Persero) Kartasura dalam prakteknya sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Dalam prakteknya memang diharuskan emas untuk ditahan oleh pihak pegadaian sebagai jaminan atas transaksi jual beli secara tidak tunai tersebut. Hal ini dikarenakan agar nasabah rutin dan tepat waktu dalam membayar angsuran agar emas dapat segera didapatkan.

Emas yang digunakan sebagai jaminan di sini bukan berarti dalam prosesnya terdapat dua akad dalam satu kali transaksi, namun akad yang digunakan hanya akad jual beli dengan jaminan agar nasabah tertib dalam membayar angsuran. Sedangkan akad gadai hanya dapat dilakukan bila nasabah telah menyelesaikan angsuran. Jika, nasabah terlambat dalam membayar angsuran maka akan dikenakan denda yang dimaksudkan agar nasabah tidak lalai atau terlambat dalam membayar angsuran.

4.2 Saran

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis, penulis memberikan saran kepada pihak pegadaian untuk mempertegas bahwa adanya jaminan dalam transaksi jual beli ini hanya digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bukan merupakan perwujudan dari akad gadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni, N. 2013. Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI. *Economica* , IV (1).
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sujarwati, V. W. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Suwanda, I. 2018. *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI no.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Studi PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Zamzam, F. F. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Zuhriah. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia PT Pegadaian Persero (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.